

Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan, Panel Data Enam Provinsi Di Pulau Jawa

Yosi Eka Putri^{1*}, Erita²

^{1,2}STKIP PGRI Sumatera Barat

*Corresponding author, e-mail: yosy_ekaputri@yahoo.com

Diterima: 21 Januari 2019
Revisi: 07 Maret 2019
Available Online: 30 April 2019

KEYWORD

economic growth, income inequality

A B S T R A C T

This study aims to analyze (1) the effect of tax ratio, investment, regional fiscal autonomy degrees on economic growth in Java island, (2) the effect of labor productivity, economic growth, investment and the Human Development Index (HDI) on income inequality in Java island. The type of research is descriptive and associative research. The type of data is documentary, the data source is panel data during 2013 - 2017 in six provinces in Java uses simultaneous equation modeling tools the Indirect Least Squared (ILS) method). Income inequality and economic growth are Endogenous variables in this research. While tax ratios, regional fiscal autonomy degrees, labor productivity, investment and the Human Development Index (HDI) as the exogenous variables.

The results revealed that (1) tax ratio, investment, regional fiscal autonomy degrees significantly affect economic growth in Java island. (2) economic growth investment labor productivity and Human Development Index significantly affect income inequality in Java island. The policies that can be suggested are that efforts are needed to increase economic growth with the efforts of the central government together with regional governments to increase Regional Original Revenue (PAD) by optimizing regional potentials. Increasing the potential of this area will encourage the increase of PAD in each region will have an impact on the increasing degree of regional fiscal autonomy (ratio between PAD and Total Regional Revenue). Focus more on equity-oriented development not only on economic growth.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/). Some rights reserved

PENDAHULUAN

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi semestinya diiringi dengan pemerataan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti jika diiringi dengan ketimpangan pendapatan yang juga tinggi, artinya

pertumbuhan tersebut tidak dinikmati masyarakat secara merata. Gini Rasio merupakan salah satu indikator untuk mengukur tinggi rendahnya tingkat ketimpangan pendapatan di sebuah negara (Todaro, 2009).

Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan dan sebaliknya jika pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan maka ketimpangan pendapatan juga demikian (Todaro, 2009). Pada tahun 2015 di pulau Papua, pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di sisi lain ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi penurunan maka ketimpangan pendapatan juga akan mengalami penurunan.

Produktivitas tenaga kerja juga mempengaruhi tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan sebuah negara (Ebel dan Yilmaz, 2012). Jika sebuah daerah mengalami peningkatan produktivitas tenaga kerja sementara daerah lain tidak, maka akan terjadi kesenjangan di kedua daerah tersebut. Hal ini karena daerah yang memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja tinggi tentu akan memiliki tingkat produksi yang lebih tinggi dari daerah dengan produktivitas tenaga kerja yang lebih rendah. Namun hal ini tidak terjadi dengan data di Pulau Kalimantan dimana pada tahun 2015/2016 produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan, sedangkan ketimpangan pendapatan pada tahun yang sama malah menunjukkan peningkatan. Kondisi ini tidak searah dengan teori yang menyatakan bahwa jika produktivitas tenaga kerja mengalami penurunan maka ketimpangan pendapatan juga akan mengalami penurunan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah tingkat investasi. Perbedaan tingkat investasi antara dua daerah akan membawa dampak timpangnya distribusi pendapatan pada daerah tersebut, akibatnya hal ini mendorong tingginya ketimpangan pendapatan antara keduanya. Data pada tahun 2016/2017 menunjukkan bahwa tingkat investasi di Pulau Kalimantan mengalami peningkatan, sedangkan data ketimpangan pendapatan menunjukkan kondisi penurunan. Kondisi ini menentang teori yang disampaikan Barro (2008) bahwa jika peningkatan investasi di suatu daerah terjadi namun tidak diikuti oleh meningkatnya jumlah investasi di daerah lain, akan memicu ketimpangan pendapatan semakin meningkat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diduga juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan di sebuah negara. Tidak meratanya IPM di berbagai daerah menyebabkan daerah yang memiliki IPM lebih tinggi akan memiliki kualitas manusia yang baik, begitu pula sebaliknya. Tahun 2015 di Pulau Sulawesi ketimpangan pendapatan naik dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan data pada tahun yang sama menunjukkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kondisi ini bertentangan dengan teori yang disampaikan oleh Barro (2008) menyatakan bahwa peningkatan IPM pada suatu daerah namun tidak dibarengi dengan peningkatan IPM di daerah lain akan mendorong peningkatan ketimpangan pendapatan antara keduanya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran untuk mengukur prestasi ekonomi sebuah negara. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran terhadap dampak riil dari pelaksanaan kebijakan pembangunan. Schumpeter (Boediono, 2014) memberikan definisi pertumbuhan ekonomi sebagai nilai output masyarakat yang meningkat dikarenakan oleh semakin meningkatnya penggunaan input dalam proses produksi tanpa adanya perubahan teknologi tersebut. Sedangkan menurut Rahardjo (2013) pertumbuhan ekonomi adalah usaha peningkatan kapasitas produksi untuk memperoleh penambahan output, indikatornya menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu tujuan utama pembangunan, dimana pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk mendorong perubahan struktur perekonomian daerah menuju perekonomian berimbang dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan mengatasi ketimpangan pendapatan.

Konsep desentralisasi fiskal perlu dikaji dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Desentralisasi fiskal mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 di Indonesia. Pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik berubah menjadi desentralistik. Kewenangan yang awalnya dominan ditentukan oleh pemerintah pusat mulai di delegasikan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan memperhatikan keanekaragaman di daerah tersebut. Melalui konsep desentralisasi diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan partisipatif (Apriasa, 2013).

Pengeluaran dan penerimaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah merupakan bagian dari program untuk meningkatkan efisiensi pada sektor publik (pemerintah), menekan defisitnya anggaran dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ebel dan Yilmaz, 2012). Perubahan delegasi kewenangan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah, dilakukan karena adanya pemahaman bahwa pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui kemampuan dan kondisi daerahnya masing-masing dibanding pemerintah pusat, sehingga secara ekonomi efisiensi akan mengalami peningkatan (Yushkov, 2015). Adanya transfer kepada daerah seperti dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta instrumen peningkatan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan bentuk implementasi hubungan antara pusat dan daerah. Salah satu komponen penentu tinggi rendahnya nilai PAD adalah tinggi rendahnya pajak daerah.

Data pada Tabel 1. menunjukkan data pertumbuhan ekonomi, ketimpangan penda, produktivitas tenaga kerja, investasi, rasio pajak dan Indeks Pembangunan per pulau di Indonesia dari tahun 2013 - 2017. Menurut Apriesta (2013) peningkatan derajat otonomi fiskal daerah akan meningkatkan kinerja pembangunan ekonomi karena jika pendapatan daerah meningkat maka daerah akan lebih leluasa mengatur anggaran perbelanjaannya. Jika belanja daerah mengalami peningkatan maka akan menggerakkan perekonomian, jumlah produksi barang dan jasa mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan.

Tabel 1. Data Ketimpangan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, Produktivitas Tenaga Kerja, Investasi, Rasio Pajak dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) per Pulau di Indonesia Tahun 2013 - 2017

Wilayah	Ketimpangan Pendapatan					Pertumbuhan Ekonomi (%)					Produktivitas Tenaga Kerja (Milliar Rp / Orang)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Sumatera	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	3,51	3,54	5,75	6,41	6,18	0,0238	0,0234	0,0239	0,0232	0,0247
(%)	-	1,67	7,21	4,59	2,34	-	1,00	62,14	11,44	-3,56	-	-1,39	1,90	-2,70	6,20
Jawa	0,33	0,35	0,38	0,39	0,39	5,56	5,58	5,96	5,22	5,42	0,0212	0,0218	0,0228	0,0230	0,0235
(%)	-	5,02	7,64	4,44	0,00	-	0,45	6,74	-12,43	3,81	-	2,77	4,78	0,59	2,32
Kalimantan	0,32	0,34	0,35	0,37	0,36	4,45	4,49	5,66	5,73	5,56	0,0351	0,0320	0,0326	0,0309	0,0323
(%)	-	5,51	5,22	5,67	-2,68	-	0,83	26,25	1,19	-3,04	-	-8,71	1,62	-5,13	4,59
Sulawesi	0,33	0,34	0,39	0,40	0,40	7,25	7,15	8,63	8,52	8,77	0,0120	0,0215	0,0263	0,0134	0,0151
(%)	-	5,13	14,63	1,70	0,00	-	-1,37	20,75	-1,36	3,01	-	78,47	22,59	-48,90	12,09
Papua	0,34	0,34	0,37	0,39	0,40	11,12	11,90	9,92	8,55	7,85	0,0135	0,0146	0,0157	0,0160	0,0175
(%)	-	1,48	6,57	6,85	1,92	-	6,99	-16,58	-13,81	-8,28	-	8,41	7,41	2,01	9,46

Lanjutan Tabel 1

Wilayah	Rasio Pajak (%)					Investasi (Milliar Rp)					Indeks Pembangunan Manusia (IPM)				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
Sumatera	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	89.310	95.550	103.990	114.020	123.790	72,50	72,98	73,37	73,88	74,34
(%)	-	1,67	7,21	4,59	2,34	-	6,98	8,83	9,64	8,58	-	0,67	0,54	0,70	0,61
Jawa	0,33	0,35	0,38	0,39	0,39	273.560	286.380	308.310	337.370	366.180	70,66	71,14	71,67	72,21	72,73
(%)	-	5,02	7,64	4,44	0,00	-	4,69	7,66	9,43	8,54	-	0,67	0,74	0,76	0,71
Kalimantan	0,32	0,34	0,35	0,37	0,36	35.250	37.060	39.640	42.750	46.880	71,32	71,89	72,32	72,85	73,39
(%)	-	5,51	5,22	5,67	-2,68	-	5,12	6,95	7,86	9,65	-	0,80	0,59	0,73	0,75
Sulawesi	0,33	0,34	0,39	0,40	0,40	21.590	23.850	26.320	30.490	24.290	70,39	70,97	71,46	71,96	72,48
(%)	-	5,13	14,63	1,70	0,00	-	12,36	10,48	10,36	15,85	-	0,83	0,70	0,70	0,72
Papua	1,26	1,52	0,37	0,39	0,40	9.390	10.300	11.270	12.220	13.260	67,63	68,18	68,64	69,09	69,62
(%)	-	1,48	6,57	6,85	1,92	-	9,76	9,40	8,45	8,48	-	0,81	0,67	0,66	0,77

Sumber: Badan Pusat Statistik dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia

Rasio Pajak juga mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi. Jika rasio pajak mengalami penurunan maka pendapatan disposibel meningkat sehingga memiliki daya beli yang semakin tinggi, akibatnya masyarakat akan memperbanyak tingkat konsumsinya. Jika konsumsi meningkat tentu harus diimbangi dengan peningkatan penawarannya, sehingga hal ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Data pada tahun 2013/2014 di Pulau Papua menunjukkan rasio pajak Papua mengalami peningkatan di tahun 2014, namun pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan angka peningkatan. Kondisi ini bertentangan dengan teori dari Apriesta (2013) yang menyatakan bahwa jika rasio pajak mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.

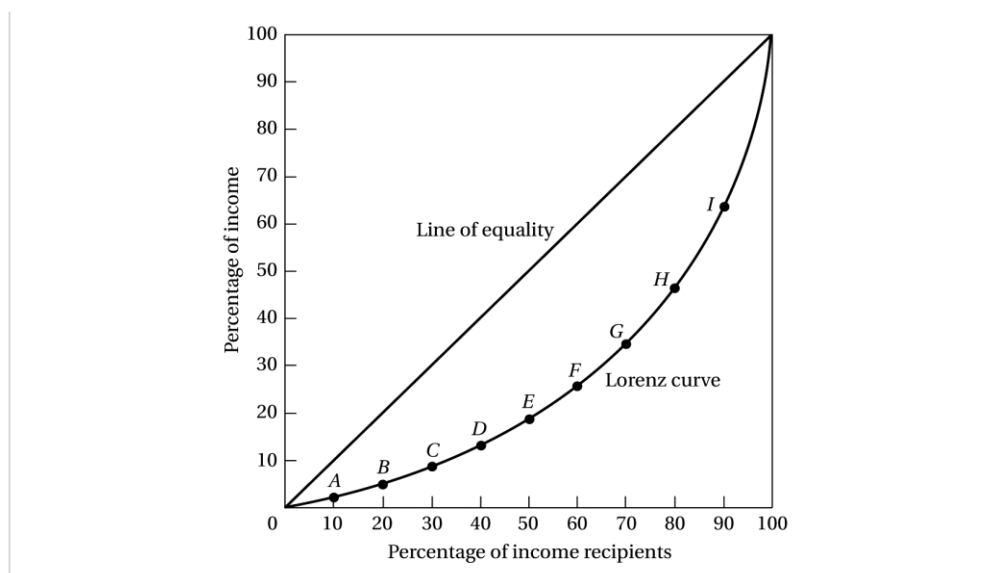
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) pengaruh, rasio pajak, derajat otonomi fiskal daerah dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, 2) pengaruh pertumbuhan ekonomi, investasi, produktivitas tenaga kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa

Menurut Todaro (2012) ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan pendapatan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang tinggi dalam masyarakat (Todaro, 2012). Dengan arti kata ketimpangan

pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang masyarakat terima sehingga ketimpangan semakin tinggi diantara mereka. Konsekwensinya si kaya akan makin kaya dan si miskin akan bertambah miskin.

Ukuran ketimpangan pendapatan terdiri atas dua, 1) Koefisien Gini, adalah ukuran untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan yang nilainya berkisar antara 0 sampai 1. Ini adalah rasio antara luas area antara Kurva Lorenz dengan garis merata sempurna. Nilai koefisien Gini yang mendekati angka nol, menunjukkan distribusi pendapatan makin merata, begitu sebaliknya dimana semakin mendekati angka satu menggambarkan distribusi yang semakin tidak merata diantara kelompok penerima pendapatan, artinya ketimpangan pendapatan semakin tinggi. Todaro (2009). Ada tiga kriteria ketimpangan pendapatan menurut Koefisien Gini yaitu : besar dari 0,5 merupakan kriteria tingkat ketimpangan tinggi; nilai 0,35 - 0,5 kriteria tingkat ketimpangan sedang, dibawah angka 0,35 merupakan kriteria ketimpangan rendah. 2) Kurva Lorenz, kurva ini mewakili fungsi distribusi pendapatan kumulatif.

Jika jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna) makin jauh, maka distribusi pendapatannya makin timpang. Dengan kata lain jika bentuk kurva Lorenz semakin melengkung mendekati sumbu horizontal bagian bawah mengindikasikan makin tidak meratanya pendapatan.



Gambar 1. Kurva Lorenz
Sumber : Todaro (2009)

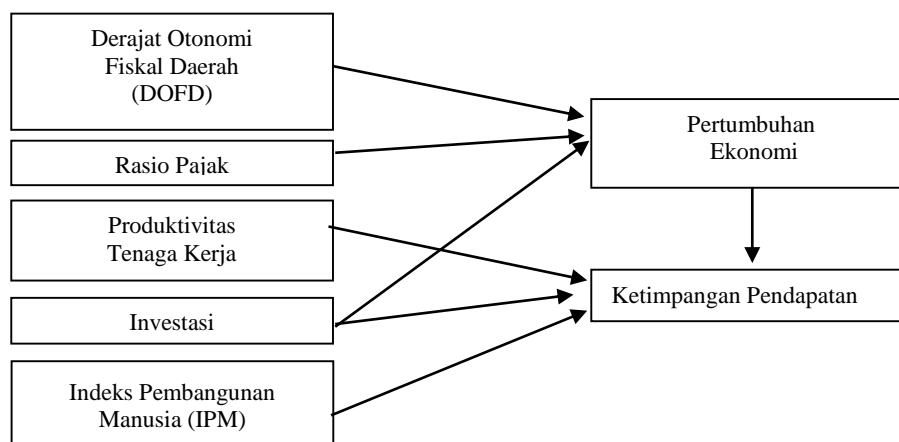
Kuznets menyampaikan distribusi pendapatan cenderung memburuk pada awal pertumbuhan ekonomi, selanjutnya distribusi pendapatan akan makin baik, namun di waktu tertentu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan sehingga menurun lagi. Hal tersebut digambarkan dalam kurva Kuznets “U-ter-balik”, karena perubahan longitudinal (*time series*) dalam distribusi pendapatan. Seiring dengan naiknya GNI per kapita, pada beberapa kasus penelitian Kuznets (Todaro, 2009) menyimpulkan bahwa dalam jangka pendek terdapat hubungan positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan. Sebaliknya dalam jangka panjang hubungannya berkorelasi negatif. Pada tahap awal pembangunan distribusi pendapatan memburuk, kemudian membaik, ini dikarenakan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Teori Lewis menyatakan bahwa tahapan pertumbuhan awal akan fokus di sektor industri modern yang membuka lapangan kerja terbatas namun tingkat upah dan produktivitasnya tinggi

Barro (2000) dan kemudian Barro (2008) (yang memperbarui dan memperluas pekerjaan sebelumnya pada tahun 2000) di sisi lain, memberikan dukungan untuk kurva Kuznets. Menggunakan Basis Data Ketimpangan Penghasilan Dunia (*World Income Inequality Database, WIID*) yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Barro menyimpulkan dalam kedua penelitian bahwa hubungan berbentuk U terbalik ada sebagai keteraturan empiris.

Aliran makroekonomi sisi penawaran menggarisbawahi pentingnya pengaruh rangsangan pajak dalam mempengaruhi perilaku dari perekonomian. Jika tarif pajak marjinal turun akan mendorong masyarakat lebih giat dalam menghasilkan pendapatan, menabung dan berinvestasi, sehingga akan meningkatkan produktivitas perekonomian dalam menghasilkan produksi barang dan jasa. Jika produksi agregat meningkat, artinya kemampuan perekonomian untuk menciptakan kesempatan kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Penurunan tarif pajak marjinal adalah langkah yang dapat diambil untuk mengatasi masalah pengangguran dan inflasi (Nanga, 2015).

Yuskhov (2015) dalam penelitiannya terkait analisis empiris wilayah Rusia untuk tahun 2005-2012 menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang berlebihan di wilayah tersebut, yang tidak disertai dengan tingkat desentralisasi pendapatan masing-masing, secara signifikan dan negatif terkait dengan pertumbuhan ekonomi regional. Sebaliknya, ketergantungan regional pada transfer fiskal antar pemerintah dari pusat federal secara positif terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Selain itu Baskaran (2013) melakukan penelitian pada 23 negara OECD menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki efek negatif tetapi tidak signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan ekonomi.

Gambar 2 dibawah ini menggambarkan kerangka konsptual penelitian ini :



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Pada penelitian ini menggunakan uji analisis induktif yaitu uji stasioner, uji kointegrasi, uji heteroskedastisitas, uji auto korelasi. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 1) derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak dan investasi diduga berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa, 2) pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digolongkan penelitian deskriptif dan asosiatif, dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan antar variabel bebas (Gujarati, 2012). Penelitian ini juga bersifat *eks post facto* yaitu penelitian yang bersifat mencari tahu apa yang menyebabkan suatu hal terjadi dan mengurutkan ke belakang sehingga diketahui faktor-faktor penyebabnya

Jenis data dalam penelitian ini adalah data dokumenter. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang tidak diperoleh secara langsung tetapi melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ketimpangan pendapatan, Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah, total pajak, produktivitas tenaga kerja dan investasi masing - masing di enam provinsi di Pulau Jawa.

Sedangkan bentuk data adalah data panel. Data panel adalah gabungan antara data *time series* (runtut waktu) dengan data *cross section* (data silang) (Gujarati, 2012). Data seluruh variabel dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2012 – tahun 2016 pada 6 provinsi di Pulau Jawa dengan jumlah data (n) sebanyak $6 \times 5 = 30$.

Berikut ini merupakan definisi operasional variabel penelitian :

1. Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) adalah terjadinya kenaikan dalam jumlah output (PDRB) masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang dinyatakan dalam satuan persentase per tahun. Dengan formula sebagai berikut:

$$y_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100 \%$$

dimana:

- y_t = Tingkat pertumbuhan ekonomi masing - masing provinsi di Indonesia pada tahun t yang dinyatakan dalam persentase
- Y_t = PDRB provinsi di Pulau Jawa pada periode t
- Y_{t-1} = PDRB provinsi di Pulau Jawa pada periode sebelumnya
2. Ketimpangan Pendapatan (Y_2) merupakan perbedaan pendapatan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok antar provinsi di Pulau Jawa dengan menggunakan indeks Gini Rasio.
 3. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (X_1) adalah pengukuran derajat otonomi fiskal daerah menggunakan pendekatan penerimaan dengan mengukur derajat desentralisasi fiskal dari *share* Penerimaan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah.

$$DOFD_{it} = \frac{PAD_{it}}{TPD_{it}} \times 100\%$$

Dimana:

$DOFD_{it}$ = Derajat Otonomi Fiskal Daerah provinsi i, pada tahun t

PAD_{it} = Pendapatan Asli Daerah provinsi i, pada tahun t

TPD_{it} = Total Penerimaan Daerah provinsi i, pada tahun t

Satuan dari variabel derajat otonomi fiskal daerah adalah persen.

4. Rasio Pajak (X_2) yaitu hasil bagi antara pajak dengan PDRB masing - masing provinsi/kabupaten/kota di Pulau Jawa yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
5. Produktivitas Tenaga Kerja (X_3) adalah hasil bagi antara output (PDRB) dengan angkatan kerja yang bekerja di masing-masing provinsi di Pulau Jawa dan dinyatakan dalam satuan juta rupiah/orang per tahun.
6. Investasi (X_4) adalah laju pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) masing-masing provinsi di Pulau Jawa yang dinyatakan dalam satuan persen (%).
7. Indeks Pembangunan Manusia (X_5) adalah indikator capaian pembangunan manusia yang dihitung dari komponen indeks pendidikan, indeks harapan hidup, dan standar hidup.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait seperti laporan bulanan dan laporan tahunan, Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia, BPS (Badan Pusat Statistik) berbagai edisi, serta Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Indonesia dan berbagai situs seperti <http://data.worldbank.org/country/indonesia>.

Model Analisis (Persamaan Simultan *Indirect Least Square*)

Penelitian ini menggunakan model persamaan simultan. Pada model silmutan terdapat dua variabel yaitu variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditetapkan oleh model sebagai akibat adanya hubungan antara variabel, sedangkan variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditetapkan diluar model (Gujarati, 2012).

Adapun persamaan-persamaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_{1t}$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + \beta_2 X_3 + \beta_3 X_4 + \beta_4 X_5 + \mu_{2t}$$

dimana :

Y_1 = Pertumbuhan Ekonomi

X_1 = Derajat Otonomi Fiskal Daerah

X_2 = Rasio Pajak

Y_2 = Ketimpangan Pendapatan

X_3 = Produktivitas tenaga kerja

X_4 = Investasi

X_5 = IPM

α_0 = Konstanta pada persamaan Pertumbuhan Ekonomi

α_1 = Koefisien estimasi Derajat Otonomi Fiskal Daerah

α_2 = Koefisien estimasi Rasio Pajak

β_0 = Konstanta pada persamaan Ketimpangan Pendapatan

β_1 = Koefisien estimasi Pertumbuhan Ekonomi pada Persamaan Ketimpangan Pendapatan

β_2 = Koefisien estimasi Produktivitas Tenaga Kerja

β_3 = Koefisien estimasi Investasi

β_4 = Koefisien estimasi IPM

μ_{1t} = error term persamaan Pertumbuhan Ekonomi

μ_{2t} = error term persamaan Ketimpangan Pendapatan

Uji Identifikasi

Uji identifikasi dengan *order condition* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Persamaan 3.3: $K-k = 5 - 3 > m - 1 = 2 - 1 \rightarrow 2 > 1$ (*overidentified*)

Persamaan 3.4: $K-k = 5 - 3 > m - 1 = 2 - 1 \rightarrow 2 > 1$ (*overidentified*)

Dari hasil uji identifikasi menggunakan *order condition* terhadap dua persamaan diatas di dapat kesimpulan bahwa semua persamaan *overidentified* akan tetapi variabel endogen tidak memiliki hubungan dua arah, maka untuk menaksir parameter dari persamaan-persamaan yang ada adalah menggunakan metode *Indirect Least Squared* (ILS) (Gujarati, 2012). Sehingga penaksiran koefisiennya dikatakan tepat diidentifikasi jika nilai angka yang unik dari parameter struktural dapat diperoleh.

Oleh karena metode yang digunakan adalah ILS maka estimasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

Tahap 1 melakukan regresi terhadap seluruh variabel eksogen.

Tahap 2 melakukan regresi variabel endogen pertumbuhan ekonomi yang sudah diestimasi, produktivitas tenaga kerja dan investasi terhadap ketimpangan wilayah (Y_2).

Reduce Form

Setelah melakukan uji identifikasi dengan *order condition*, maka langkah selanjutnya adalah melakukan proses *reduce form* dari masing-masing persamaan di atas. Proses *reduce form* dilakukan untuk mengetahui variabel eksogen (*predetermine*) dalam sistem persamaan simultan (Greene, 2003:77). Adapun proses *reduce form* dari masing-masing persamaan di atas adalah sebagai berikut :

a. $Y_1 = \alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_{1t}$

Oleh karena persamaan ini adalah ILS sehingga *reduce form* pada persamaan pertumbuhan ekonomi (Y_1) tidak bisa dilakukan.

b. $Y_2 = \beta_0 + \beta_1 Y_1 + \beta_2 X_3 + \beta_3 X_4 + \beta_4 X_5 + \mu_{2t}$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 (\alpha_0 + \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \alpha_3 X_3 + \mu_{1t}) + \beta_2 X_3 + \beta_3 X_4 + \beta_4 X_5 + \mu_{2t}$$

$$Y_2 = (\beta_0 + \beta_1 \alpha_0) + \beta_1 \alpha_1 X_1 + \beta_1 \alpha_2 X_2 + \beta_1 \alpha_3 X_3 + \beta_2 X_3 + \beta_3 X_4 + \beta_4 X_5 + (\beta_1 \mu_{1t} + \mu_{2t})$$

$$Y_2 = \Pi_{10} + \Pi_{11}X_1 + \Pi_{12}X_2 + \Pi_{13}X_3 + \Pi_{14}X_4 + \Pi_{15}X_5 + \Pi_{21} \mu_t$$

Berdasarkan *reduce form* tersebut maka pertumbuhan ekonomi merupakan variabel endogen, begitu juga dengan variabel ketimpangan pendapatan. Sementara itu derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM bertindak sebagai variabel eksogen dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Data menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan masing-masing variabel ke dalam tabel distribusi frekuensi kemudian dilakukan analisis persentase serta memberikan interpretasi terhadap analisis tersebut. Serta menghitung komponen statistik deskriptif seperti rata - rata (mean), titik tengah (median), modus, nilai tertinggi, nilai terendah, standar deviasi dan koefisien variasi dari masing-masing variabel. Selain itu analisis data menggunakan Analisis Induktif. Keunggulan lain dari penggunaan data panel adalah penyatuan informasi dari data *cross section* dan *time series* yang akan mengurangi permasalahan yang timbul akibat hilangnya variabel. Dalam data panel, hilangnya suatu variabel akan tetap menggambarkan perubahan lainnya akibat penggunaan data *time series*.

Syarat yang harus dilakukan sebelum melakukan estimasi terhadap data panel adalah dilakukannya Uji Haussman dan Uji Chow. Akan tetapi, Uji Haussman dan Uji Chow dalam penelitian model data panel ini tidak bisa dilakukan karena model yang dibangun dalam penelitian ini adalah persamaan simultan *Indirect Least Square* dengan dua tahap estimasi. Oleh karena itu, penerapan model data panel *fixed effect* dan *random effect* tidak diterapkan akan tetapi model data panel yang bisa diterapkan adalah model data panel *common effect*.

Uji Prasyarat

Uji Stationer

Jika rata-rata, varian dan autokovarian nilainya konstan dari waktu ke waktu (untuk berbagai lag yang berbeda nilainya sama, tidak masalah di titik mana memulai mengukur) maka suatu data time series dikatakan stationer. Uji stationer yang digunakan menggunakan uji akar unit yang dikembangkan oleh David Dickey dan Wayne Fuller atau yang lebih dikenal dengan uji akar unit Dickey Fuller (DF).

Uji Kointegrasi

Agar variabel-variabel non-stasioner tersebut masih dapat dimasukkan ke dalam model regresi maka harus terlebih dahulu dilakukan pengujian yang benar-benar menyimpulkan bahwa memang benar variabel eksogen mempengaruhi variabel endogen dalam hal ini misalnya variabel inflasi (Y_1) benar-benar menjelaskan atau mempengaruhi pergerakan variabel perekonomian (Y_2). Contoh jika variabel perekonomian (Y_2) dan inflasi (Y_1) yang masing-masing mengandung *unit root* atau tidak stasioner, maka untuk mengetahui pengaruh variabel Y_2 terhadap variabel Y_1 atau Y_1 terhadap Y_2 karena dalam penelitian dimana variabel endogennya ada dua. Kedua data tersebut menjadi kombinasi linear sebagai berikut :

$$Y_2 = \alpha_1 + \alpha_2 Y_1 + u_{1t}$$

dan

$$Y_1 = \alpha_3 + \alpha_4 Y_2 + u_{2t}$$

Persamaan diatas juga disebut *cointegrating regression*. Selanjutnya mengambil nilai residual dari persamaan tersebut untuk melakukan pengujian guna mendapatkan nilai residual dilakukan sebagai berikut :

$$u_{1t} = Y_2 - \alpha_1 - \alpha_2 Y_1$$

dan

$$u_{2t} = Y_1 - \alpha_3 - \alpha_4 Y_2$$

Dari hasil pengujian maka akan diketahui apakah adanya hubungan jangka panjang antara variabel Y_2 dan Y_1 .

Pengujian t-statistik pada model diatas dilakukan guna mengetahui apakah H_0 ditolak atau tidak ditolak. Jika t-statistik lebih besar dari t-tabel maka H_0 ditolak yang berarti bahwa memang benar variabel Y_2 dan Y_1 berkointegrasi atau dalam jangka panjang variabel Y_1 menjelaskan pergerakan variabel Y_2 begitu sebaliknya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk melihat ada atau tidaknya heteroskedastisitas ini digunakanlah suatu metode yang disebut dengan Uji Park.

Park mengemukakan metode bahwa varaince (s^2) merupakan fungsi dari variabel-variabel eksogen yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2016):

$$\sigma^2 i = \alpha X_i \beta$$

Persamaan ini dijadikan linear dalam bentuk persamaan logaritma sehingga menjadi:

$$\ln \sigma^2 i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Karena $s^2 i$ umumnya tidak diketahui, maka dapat ditaksir dengan menggunakan residual U_t sebagai proksi, sehingga persamaan menjadi:

$$\ln U^2 i = \alpha + \beta \ln X_i + v_i$$

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Untuk melihat ada atau tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini digunakanlah metode pengujian Durbin-Watson dengan rumus (Gujarati, 2012):

$$d = \frac{\sum (u_t - u_{t-1})^2}{\sum u_t^2}$$

dimana:

d = nilai Durbin-Watson

U_t = residual tahun yang bersangkutan

U_{t-1} = residual tahun sebelumnya

Tabel 2. Klasifikasi Nilai d

No.	Nilai d	keterangan
1	$d < d_L$	Ada autokorelasi
2	$d_L \leq d \leq d_U$	Tidak ada kesimpulan
3	$d_U \leq d \leq 4 - d_U$	Tidak ada autokorelasi
4	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$	Tidak ada kesimpulan
5	$4 - d_L < d \leq 4$	Ada autokorelasi

Sumber : Gujarati (2012)

Uji Hipotesis

1. Uji Probabilitas

Mengetahui apakah variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y) digunakan uji probabilitas dengan rumus (Gujarati, 2012) :

$$t_0 = \frac{\beta_i}{S\beta_i}$$

dimana :

t_0 = nilai pengujian

β_i = koefisien regresi variable 1

$S\beta_i$ = standar error koefisien regresi variabel i

Jika $t_0 \geq t_{tabel}$ atau $-t_0 < -t_{tabel}$, maka H_a diterima H_0 ditolak, tapi jika $t_0 < t_{tabel}$ atau $-t_0 \geq -t_{tabel}$, maka H_a ditolak dan H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2. Uji F

Tujuan uji ini adalah untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau tidak (Gujarati, 2012). Uji ini menggunakan rumus :

$$F = \frac{R^2/k}{(1-R^2)/(n-k-1)}$$

dimana:

F_0	=	nilai pengujian
R^2	=	koefisien determinasi
k	=	jumlah variabel bebas
n	=	banyak nilai observasi

Tingkat kesalahan sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dan derajat kebebasan sebesar $(n-k-1)$. Jika F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya variabel bebas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Dan sebaliknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Prasyarat

1. Hasil Uji Stasioner

Berdasarkan uji stasioner ini disimpulkan bahwa semua variabel endogen maupun eksogen memiliki nilai probabilitas yang kecil dari $\alpha = 0,05$ pada posisi *level*.

2. Hasil Uji Kointegrasi

Karena persamaan $D(UY_1) = UY_1(-1)$, dan $D(UY_2) = UY_2(-1)$ mempunyai nilai probabilitas yang kecil dari $\alpha = 0,05$ disimpulkan bahwa masing-masing persamaan dalam penelitian ini berkointegrasi.

3. Hasil Uji Heterokedastisitas

Hasil uji Heterokedastisitas dengan pada persamaan pertumbuhan ekonomi, diperoleh kesimpulan seluruh variabel pada penelitian ini mempunyai nilai probabilitas $\alpha > 0,05$. Sehingga disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi masalah heterokedastisitas. Begitu juga untuk persamaan ketimpangan, masalah heterokedastisitas tidak terjadi.

4. Uji Autokorelasi

Nilai DW pada persamaan pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan adalah 1.86378 dan 2.127482 artinya berada disekitar dua sehingga pada posisi pada daerah antara dU dan 4-dU, maka diartikan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

Pembahasan

a) Persamaan Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil olah data maka persamaan pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut :

$$Y_1 = 0.356123 + 0.369423 X_1 - 0.402386 X_2 + 0.692537 X_3$$

Variabel derajat otonomi fiskal daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh derajat otonomi fiskal daerah. Jika otonomi fiskal suatu daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi dikarenakan derajat otonomi fiskal daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa menggunakan anggaran dengan lebih produktif. Begitu pula sebaliknya.

Variabel rasio pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. Artinya jika tarif pajak diturunkan maka hal ini akan memotivasi masyarakat untuk bekerja lebih giat, meningkatkan jumlah tabungan dan melakukan investasi sehingga produktivitas perekonomian meningkat yaitu dalam hal meningkatnya kemampuan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Meningkatnya produksi agregat ini menunjukkan bahwa perekonomian mampu kesempatan kerja lebih banyak. Begitupun sebaliknya, jika pajak mengalami peningkatan akan berdampak pada turunnya daya beli masyarakat sehingga permintaan terhadap produksi barang dan jasa juga menjadi turun. Penurunan ini akan menurunkan kegiatan perekonomian, artinya menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Secara parsial, investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Jika terjadi investasi meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan, sebab kenaikan investasi menggambarkan terjadinya peningkatan dalam pembentukan modal yang berdampak terhadap meningkatnya jumlah produksi barang dan jasa. Peningkatan ini mendorong pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan. Di

sisi lain investasi menurun maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan, akibatnya jumlah produksi menurun yang berarti pertumbuhan ekonomi juga mengalami penurunan.

b) Persamaan Ketimpangan Pendapatan

Model persamaan ketimpangan pendapatan setelah di estimasi sebagai berikut :

$$Y_2 = 0.654761 + 0.327142 Y_1 + 0.168269 X_3 + 0.328923 X_4 + 0.372562 X_5$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Artinya jika pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan di suatu daerah namun tidak diiringi oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah lain maka ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan. Ini terjadi karena pada awal - awal pembangunan pelaku ekonomi lebih cenderung untuk melakukan investasi pada daerah yang relatif maju karena infrastruktur tersedia lengkap, tenaga kerja yang terlatih melimpah, ada peluang bisnis. Akibatnya daerah yang memang sudah maju akan semakin maju serta akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi sebaliknya terjadi pada daerah - daerah yang relatif tertinggal, maka daerah tersebut akan semakin ketinggalan karena memiliki banyak keterbatasan seperti terbatasnya ketersediaan tenaga kerja terdidik, infrastruktur yang tidak mendukung sehingga daerah ini akan semakin tertinggal. Karenanya ketimpangan pendapatan akan semakin lebar.

Variabel produktivitas tenaga kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Artinya jika terjadi kenaikan produktivitas tenaga kerja tidak merata di berbagai daerah akan menyebabkan terdapatnya daerah yang relatif lebih maju akibat dari tingginya produktivitas tenaga kerja. Disisi lain terdapat daerah yang relatif tidak maju akibat minimnya tenaga kerja yang produktif. Ini berarti keseimbangan pembangunan tidak terjadi. Jika terus dibiarkan maka ketimpangan pendapatan antar kabupaten / kota di Pulau Jawa akan semakin melebar.

Variabel investasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh investasi. Artinya investasi yang tidak merata antar daerah akan menyebabkan ada daerah yang relatif lebih maju akibat dari kegiatan investasi dan ada daerah yang relatif ketinggalan karena investasi yang mengalami penurunan. Hal ini perlu diatasi agar ketimpangan pendapatan tidak semakin meluas.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Ini berarti naik turunnya ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh nilai IPM. IPM yang tidak merata akan berakibat terdapatnya daerah yang lebih maju akibat dari kualitas sumber daya manusianya yang lebih baik. Sementara itu terdapat daerah yang relatif tidak maju akibat kualitas manusianya yang rendah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Derajat otonomi fiskal daerah, rasio pajak dan investasi berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Ini berarti jika derajat otonomi fiskal daerah dan investasi mengalami peningkatan sedangkan rasio pajak mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa mengalami peningkatan. Dan sebaliknya
2. Pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Dengan kata lain jika pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi dan IPM mengalami peningkatan maka ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa akan meningkat. Begitu pula sebaliknya.

Kebijakan-kebijakan yang disarankan antara lain pemerintah daerah masing-masing provinsi di Pulau Jawa diharapkan mampu mengoptimalkan peran desentralisasi fiskal dengan efektif dan efisien, sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kapasitas fiskalnya dengan pengembangan kegiatan ekonomi, melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Karena adanya tolak angsur antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan, maka pemerintah diharapkan mampu membidik sasaran kebijakan yang tepat yaitu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan tidak melupakan pentingnya pemerataan distribusi pendapatan. Salah satunya dengan cara mempermudah dan memperluas akses terhadap modal dan kesempatan kerja. Peningkatan pendapatan masyarakat menengah kebawah seperti UMKM,

meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti memberikan pelatihan-pelatihan keterampilan kepada masyarakat. Berusaha mengarahkan penggunaan pengeluaran pemerintah terhadap pengeluaran yang produktif. Sebagai contoh dengan membangun kawasan usaha yang strategis dengan tujuan untuk menambah jumlah investasi sebagai modal dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriesta, Lintangia Fajar & Miyasti. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus: Kabupaten/Kota Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Economics Volume 2, Nomor 1, Tahun 2013*.
- Barro, R., (2000), "Inequality and Growth in a Panel of Countries", *Journal of Economic Growth* 5: 5-32.
- Barro, R., (2008), "Inequality and Growth Revisited", Working Paper Series on Regional Economic Integration No:11, Asian Development Bank.
- Baskaran, T., & Field, L. (2013). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in OECD Countries: Is There a Relationship?*. *Public Finance Review*, 41 (4), 421-445
- Boediono. (2014). Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 5 Ekonomi Makro. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Pusat Statistik. (2012-2017). *Statistik Indonesia*. Jakarta : BPS
- _____. (2012-2017). Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia. Jakarta : BPS
- Ebel, Robert D dan Seidar Yilmaz. (2012). *Concept of Fiscal Decentralization and World Wide Overview*. World Bank Institute. Available: <http://www.worldbank.org>
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro
- Gujarati, Damodar. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika Buku 1*. Cetakan ke 5. Jakarta : Salemba Empat
- Nanga, Muana. (2015). *Makroekonomi Teori Masalah dan Kebijakan*. Jakarta : Raja Grafindo
- Rahardjo, Adisasmita. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah*, cetakan pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sukirno, Sadono. (2012). *Makro Ekonomi Modern: Perkembangan Klasik hingga Keynesian Baru*. Penerbit PT Raja Grafindo Persada
- Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia (SEKI) Bank Indonesia.
- Todaro, P. Michael. (2009) *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesebelas Jilid 1, Erlangga.
- Yushkov, Andrey. (2015). *Fiscal Decentralization and Regional Economic Growth : theory, Empirics, and the Russian Experience*. *Russian Journal of Economics* 1, 404-4.